

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata telah menjadi sektor utama dalam pembangunan ekonomi global dan nasional. Sebagai industri yang mengalami pertumbuhan pesat, pariwisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif di berbagai sektor pendukung seperti perhotelan, kuliner, transportasi, dan jasa lainnya (Hidayat & Djadjuli, 2020). Sektor ini juga menjadi salah satu kontributor utama dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 3,9%, dengan nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp1.414,77 triliun, menunjukkan bahwa sektor ini telah pulih sebesar 82,79% dibandingkan tahun 2019 dan pada tahun 2024 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB mencapai 4% atau meningkat dibandingkan 2023 sebesar 3,9% dan sektor pariwisata juga dapat memperluas kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang kuat (Tui *et al.*, 2023). Dalam perspektif hukum, pengelolaan sektor pariwisata di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi dasar utama pembangunan kepariwisataan nasional. Regulasi ini mencakup pengelolaan industri pariwisata, pengembangan destinasi wisata, serta kelembagaan dan pemasaran pariwisata yang diterapkan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPN). Selain itu, Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPN menegaskan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan sektor pariwisata dengan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan hidup (Fifiyanti & Damanik, 2021).



Gambar 1. 1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sumber: Bappenas (2024)

Sejalan dengan prinsip tersebut, pembangunan sektor pariwisata di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs menempatkan pariwisata sebagai salah satu mekanisme strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusivitas sosial, dan pelestarian lingkungan. Pariwisata, sebagai sektor padat karya, berperan signifikan dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Namun, kontribusi ekonomi ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai tetap memperhatikan keseimbangan

antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya sebagai sarana peningkatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkeadilan yang mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Agenda pembangunan dan Program Aksi Nasional Tahun 2020–2024 menekankan penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Salah satu poin utama dalam agenda ini adalah meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan citra destinasi wisata (Perpres No. 59 Tahun 2017). Program ini menegaskan bahwa pengelolaan pariwisata harus berbasis keberlanjutan dan inklusif, dengan mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangannya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal serta memastikan kelangsungan ekosistem dan budaya setempat (Destiana *et al.*, 2020). Kebijakan ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata. Arah pembangunan pariwisata di Indonesia menitikberatkan pada pengembangan destinasi wisata unggulan berbasis keberlanjutan. Pembangunan ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas layanan, serta kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing wisata Indonesia di tingkat global. Keberhasilan strategi ini terlihat dari pertumbuhan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, serta peningkatan pendapatan

daerah yang berasal dari sektor pariwisata. Selain itu, strategi pembangunan pariwisata nasional diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Hal ini tercermin dalam kebijakan yang mendukung pariwisata berbasis komunitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, serta penguatan peran pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal (Susi Iswanti & Zulkarnaini, 2022).

Pariwisata menjadi sektor favorit di negara berkembang karena kemampuannya dalam menciptakan efek ganda (*multiplier effect*). Brohman dalam Feronica menyatakan bahwa pariwisata adalah sektor yang tidak perlu melakukan ekspor tetapi mampu menghasilkan dampak ekonomi yang luas bagi suatu negara (Nainggolan, 2023). Hal ini berarti pariwisata mampu berpengaruh positif terhadap peningkatan sektor lain, seperti perdagangan, perhubungan, perhotelan, dan restoran. Pariwisata juga merupakan sektor yang memiliki kesiapan lebih tinggi dalam hal fasilitas, sarana, dan prasarana dibandingkan sektor lainnya, sehingga pengembangannya menjadi prioritas dalam berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan pariwisata di Indonesia diterapkan pada tiga tingkatan, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Provinsi Jawa Timur memiliki beragam potensi wisata yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, hingga ekowisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan, Pemerintah

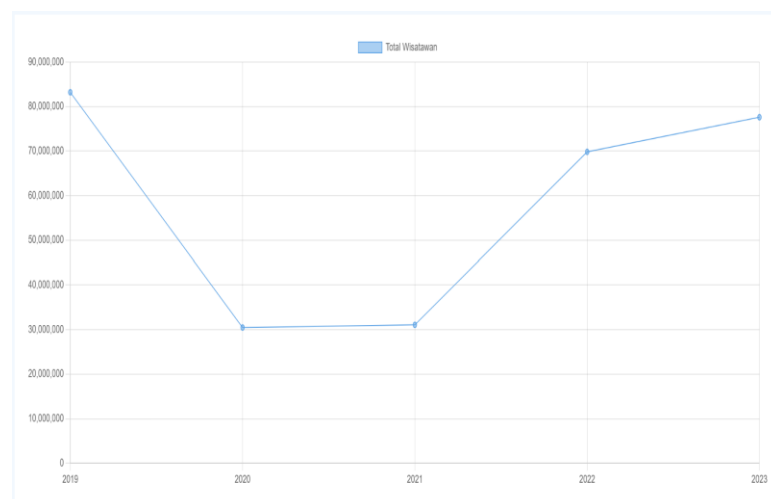
Provinsi Jawa Timur menetapkan *Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020* tentang *Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2020-2024*.

Kebijakan ini disusun sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui pendekatan *kerja sama lintas sektor*, kebijakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas lokal, serta akademisi guna memastikan pengelolaan wisata yang lebih baik dan berdaya saing tinggi.

Salah satu fokus utama dalam pengembangan pariwisata Jawa Timur adalah penguatan ekonomi kreatif dan industri pariwisata. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata melalui pelatihan dan akses permodalan. Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dengan diterapkannya konsep ekowisata dan konservasi lingkungan di berbagai destinasi wisata unggulan. Untuk memastikan keberlanjutan program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Program ini juga didukung oleh *Sekretariat Tetap Tim Koordinasi Pelaksanaan SDGs* yang berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 mengenai Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Jawa Timur untuk periode 2017-2032. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman dalam merancang program, mengembangkan kawasan wisata, serta meningkatkan daya tarik pariwisata di wilayah Jawa Timur. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sektor pariwisata Jawa Timur dapat terus berkembang tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui kolaborasi yang solid dan strategi pembangunan yang tepat, Jawa Timur siap menjadi destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menarik secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang



Gambar 1. 2 Data Kunjungan Wisman di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Grafik tersebut menunjukkan jumlah wisatawan di Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2023. Terlihat bahwa jumlah wisatawan mengalami penurunan tajam pada tahun 2020, yang sangat berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan yang membatasi pergerakan masyarakat, namun setelah mengalami stagnasi pada tahun 2021, sektor pariwisata mulai menunjukkan pemulihan yang

signifikan sejak tahun 2022 seiring dengan pelonggaran tindakan dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan wisata (UNWTO, 2022). Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023, yang menandakan keberhasilan pemulihan sektor pariwisata, didukung oleh adaptasi strategi industri terhadap perubahan perilaku wisatawan yang lebih mengutamakan pengalaman berbasis alam dan keinginan.

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam, mencakup keindahan alam, kekayaan budaya, serta wisata buatan yang terus berkembang. Berdasarkan Buku Statistik Pariwisata Jawa Timur Tahun 2023, terdapat 1.396 daya tarik wisata yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 543 merupakan wisata alam, seperti gunung, pantai, air terjun, dan taman nasional yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, 531 merupakan wisata buatan, termasuk taman rekreasi, wahana permainan, dan destinasi berbasis teknologi yang semakin berkembang seiring dengan modernisasi. Sementara itu, 322 merupakan wisata budaya, yang meliputi situs sejarah, cagar budaya, kesenian tradisional, serta kegiatan berbasis adat istiadat yang masih lestari hingga saat ini.

Dalam upaya mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2020-2024. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan

kesejahteraan sosial masyarakat. Konsep pariwisata berkelanjutan yang diterapkan dalam kebijakan ini mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, komunitas lokal, serta akademisi.

Beberapa strategi yang dijalankan meliputi penguatan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis pariwisata, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, aspek konservasi lingkungan juga menjadi prioritas dengan diterapkannya konsep ekowisata di berbagai kawasan wisata alam. Implementasi kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus berbasis keberlanjutan dan inklusivitas guna memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Keberhasilan pengembangan sektor ini bergantung pada manajemen yang efektif serta koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran utama sebagai inisiator, pembuat kebijakan, dan fasilitator guna memastikan bahwa pengelolaan pariwisata dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Pitana & Gayatri, 2005). Keberlanjutan sektor pariwisata sangat bergantung pada regulasi yang diterapkan, pengembangan infrastruktur yang memadai, serta koordinasi antara berbagai pihak terkait.

Menurut Soekanto (2007), peran dapat diartikan sebagai fungsi dan penyesuaian diri dalam suatu sistem sosial yang mencerminkan hubungan antara individu atau organisasi dengan lingkungannya. Dalam konteks pengembangan pariwisata, pemerintah bertanggung jawab sebagai pembuat kebijakan, regulator, fasilitator, dan pengelola guna memastikan perkembangan sektor ini berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mengatur prinsip keberlanjutan, manfaat ekonomi, serta pelestarian budaya dalam pengelolaan pariwisata (Peraturan BPK, 2009). Studi yang dilakukan oleh (Kedasi Silayar, Ika Sartika, 2021) menegaskan bahwa regulasi yang jelas dalam tata kelola destinasi wisata menjadi faktor kunci dalam pengelolaan pariwisata yang efektif. Selain sebagai regulator, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung pengembangan pariwisata. Infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan, transportasi umum, serta promosi destinasi wisata, menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing sektor ini. Maharani *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa keberadaan infrastruktur yang baik akan berdampak positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan serta perkembangan sektor usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi investasi pariwisata, termasuk pengembangan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata (Gita Maharani & Malau, 2022).

Pemerintah juga memiliki peran sebagai pengelola dalam memastikan implementasi kebijakan yang telah dirancang dapat berjalan secara efektif. Efektivitas kebijakan pariwisata sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola destinasi wisata, melibatkan masyarakat lokal, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Pemerintah harus memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan agar sektor pariwisata dapat berkembang dengan optimal. Penelitian yang dilakukan oleh (Tui *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah harus berperan aktif dalam membangun kemitraan dengan sektor swasta sebagai investor dan penyedia layanan, serta masyarakat sebagai pelaku utama dalam mendukung keberlanjutan industri pariwisata.

Kabupaten Ponorogo, terletak di Jawa Timur, memiliki potensi wisata yang signifikan terutama dalam sektor alam, budaya, dan religi. Salah satu ikon budaya yang telah dikenal luas adalah kesenian Reog Ponorogo, yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Sektor pariwisata telah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian lokal di Ponorogo. Kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tergolong signifikan, mengingat tingginya kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata itu sendiri, tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti kuliner, penginapan, transportasi, dan produk kerajinan lokal.

Tabel 1. 1 Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

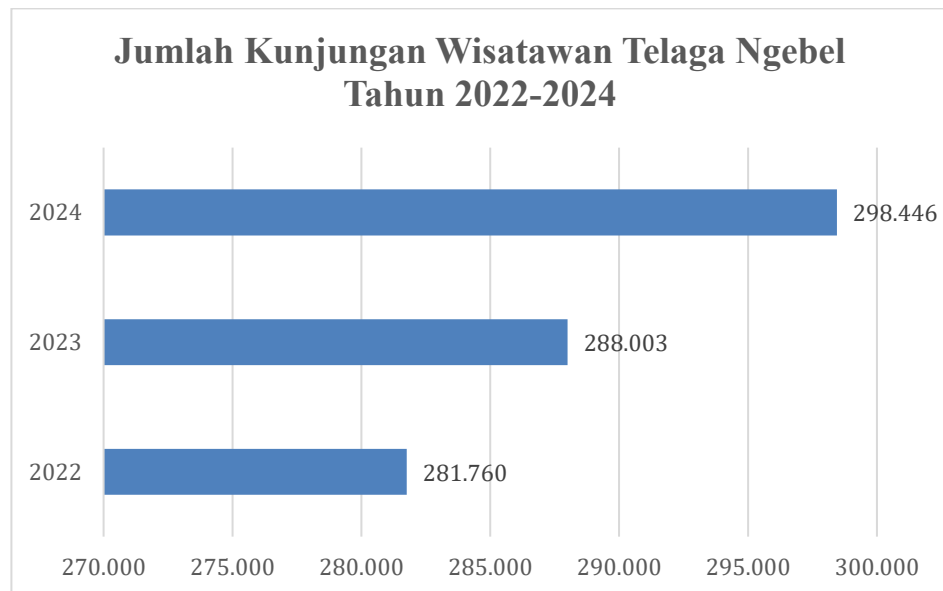
Daya Tarik Wisata	Jumlah Kunjungan Tahun 2024
Telaga Ngebel	298.466
Taman Wisata Ngembag	10.410
Makam Batoro Katong	40.881
Makam Kyai Ageng M. Besari & Tegalsari	85.157
Makam Astana Srandil	12.801
Goa Lowo	404
Situs Watu Dukun	448
Makam Tumenggung Djajengrono	0
Makam Tumenggung Brotonegoro	352
Mloko Sewu	0
Ngebel Adventure Park	169
Sendang Bulus	41.190
Brilliant Water Park	145.912
Air Terjun Pletuk	0
Air Panas Tirta Husada	53.753
Gunung Beruk	0
Air Terjun Coban Lawe	0
Tubing Mendak	438
Kampung Durian	2.300
Air Terjun Jurang Gandul	3.737
Kolam Renang Tirta Menggolo	8.395
Sumorobangun Flowers Biting	9.284
Bukit Soeharto	56.357

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Ponorogo (2024)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Telaga Ngebel merupakan destinasi wisata dengan jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2024, yaitu sebanyak 298.466 wisatawan. Angka ini menunjukkan bahwa Telaga Ngebel

masih menjadi daya tarik utama pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, destinasi seperti Brilliant Water Park dan Makam Kyai Ageng M. Besari & Tegalsari juga mencatat jumlah kunjungan yang cukup tinggi, masing-masing mencapai 145.912 wisatawan dan 85.157 wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa selain wisata alam, wisata religi juga memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan jumlah wisatawan di Ponorogo.

Beberapa destinasi lain seperti Goa Lowo, Situs Watu Dukun, dan Tubing Mendak mencatat jumlah kunjungan yang relatif rendah, bahkan beberapa lokasi belum menunjukkan aktivitas wisata yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah, terutama dalam hal promosi, perbaikan aksesibilitas, dan penyediaan sarana pendukung wisata. Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa potensi wisata di Ponorogo masih sangat besar untuk dikembangkan. Optimalisasi manajemen destinasi dan peningkatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta pelaku usaha wisata diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata daerah ini di masa mendatang.



Gambar 1. 3 Kunjungan Wisatawan Telaga Ngebel Tahun 2022-2024
Sumber: Disbudparpora Kabupaten Ponorogo (2024)

Berdasarkan data kunjungan wisatawan ke Telaga Ngebel selama periode 2022 hingga 2024, terlihat adanya pola pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2022 jumlah pengunjung tercatat sebanyak 281.760 orang, kemudian mengalami peningkatan menjadi 288.003 orang pada tahun 2023. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan jumlah wisatawan yang mencapai 298.446 orang, menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kenaikan ini tidak terlepas dari peran aktif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo. Lembaga tersebut tidak hanya mengelola objek wisata, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, serta promotor destinasi wisata. Upaya promosi digital, kerja sama dengan pelaku usaha lokal, dan penyelenggaraan event budaya seperti Festival Reog terbukti

efektif dalam meningkatkan eksposur pariwisata Telaga Ngebel dan menarik lebih banyak wisatawan setiap tahunnya.



Gambar 1. 4 Tiket Masuk Pariwisata Telaga Ngebel
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Meskipun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Telaga Ngebel mengalami peningkatan yang cukup signifikan, masih terdapat sejumlah kendala dalam sistem pengelolaan tiket masuk. Saat ini, tiket masuk masih menggunakan karcis manual yang dicetak secara sederhana, sehingga kurang efisien dalam proses administrasi maupun pendataan jumlah pengunjung. Selain itu, metode pembayaran yang tersedia masih terbatas, yakni hanya melalui transaksi tunai. Hal tersebut kerap menimbulkan hambatan, terutama bagi wisatawan yang terbiasa menggunakan metode pembayaran digital seperti transfer bank, dompet digital, atau QRIS yang kini semakin populer.



Gambar 1. 5 Pintu Masuk Pariwisata Telaga Ngebel
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan akses pemesanan tiket. Wisatawan belum dapat melakukan reservasi secara daring (*online*) sehingga mereka harus membeli tiket langsung di lokasi. Hal ini tidak hanya menimbulkan antrean panjang pada saat musim liburan, tetapi juga berpotensi menurunkan kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Padahal, di era digitalisasi seperti sekarang, banyak destinasi wisata di Indonesia yang telah mengadopsi sistem pemesanan dan pembayaran tiket berbasis aplikasi atau platform daring. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Telaga Ngebel masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal digitalisasi layanan tiket. Penerapan sistem tiket elektronik (*e-ticketing*) dengan dukungan berbagai metode pembayaran non-tunai tidak hanya akan memudahkan wisatawan, tetapi juga meningkatkan akurasi data jumlah pengunjung.

Selain persoalan tiket, Telaga Ngebel juga menghadapi permasalahan pada aspek penyediaan informasi wisata yang dinilai kurang memadai dalam memberikan layanan kepada pengunjung. Hingga saat ini, kawasan tersebut belum dilengkapi dengan *Tourism Information Center (TIC)* atau pusat informasi pariwisata yang seharusnya menjadi salah satu fasilitas utama dalam mendukung kebutuhan wisatawan. TIC memiliki fungsi penting sebagai ruang layanan publik yang dirancang untuk menyediakan informasi lengkap, akurat, serta mudah diakses terkait berbagai aspek perjalanan wisata. Tanpa adanya fasilitas ini, sebagian besar wisatawan masih bergantung pada informasi dari media sosial, situs internet, atau bertanya langsung kepada masyarakat sekitar, yang sering kali menimbulkan keterbatasan, ketidakpastian, bahkan informasi yang tidak seragam mengenai destinasi tersebut. Selain itu, TIC dapat meningkatkan kualitas pelayanan karena mampu menyediakan rekomendasi yang terstandar, mulai dari informasi hotel, restoran, transportasi lokal, hingga paket perjalanan wisata yang terintegrasi. TIC juga dapat menghadirkan fasilitas tambahan seperti peta digital interaktif, pusat dokumentasi, hingga penyediaan brosur berbahasa asing yang akan memudahkan wisatawan mancanegara. Dari sisi manajerial, TIC juga bisa menjadi wadah untuk mengumpulkan data kunjungan, tren kebutuhan wisatawan, serta umpan balik mengenai kualitas layanan, yang nantinya dapat digunakan untuk evaluasi dan perencanaan pengembangan destinasi secara lebih tepat sasaran.

Di samping persoalan terkait belum terpenuhinya papan informasi yang belum memadai, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Telaga Ngebel juga menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius terkait dengan pengelolaan

sampah, di mana peningkatan jumlah wisatawan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Gambar dibawah ini menunjukkan sebagian besar pengunjung masih menunjukkan perilaku yang kurang bertanggung jawab dalam membuang sampah, meskipun pihak pengelola telah menyediakan tempat pembuangan sampah di berbagai titik strategis di sekitar kawasan wisata.



Gambar 1. 6 Kondisi Sampah di Kawasan Sekitar Telaga Ngebel
Sumber: Website Instagram Ponorogo.Update (2024)

Masalah ini semakin kompleks ketika diamati dari aspek perilaku wisatawan, meskipun fasilitas tempat sampah telah disediakan dalam jumlah yang memadai dan tersebar di beberapa titik lokasi, banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan di area sekitar telaga, jalur pendakian, maupun tempat-tempat umum lainnya. Hal ini tidak hanya mencerminkan rendahnya kesadaran lingkungan para wisatawan, tetapi juga menunjukkan kurang efektifnya sistem pengelolaan sampah yang ada.

Dampak dari kondisi ini terlihat jelas dengan banyaknya sampah plastik, bekas makanan, dan berbagai jenis sampah lainnya yang berserakan di berbagai sudut kawasan wisata. Hal tersebut tidak hanya menciptakan pemandangan yang

tidak sedap dipandang, tetapi juga mengurangi nilai estetika lingkungan secara signifikan. Kondisi ini tentu menimbulkan kesan yang buruk terhadap pengalaman berwisata, di mana banyak pengunjung menyampaikan keluhan mengenai ketidaknyamanan akibat sampah yang bertebaran di area wisata. Lebih memprihatinkan lagi, akumulasi sampah yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang lebih serius, seperti pencemaran air telaga dan gangguan terhadap ekosistem sekitar. Kondisi ini menjadi ironi tersendiri mengingat Telaga Ngebel merupakan destinasi wisata alam unggulan yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.

Sebagai wujud implementasi otonomi daerah yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, Kabupaten Ponorogo seharusnya memiliki wewenang penuh dalam mengembangkan sektor pariwisata di wilayahnya. Hal ini mencakup eksplorasi dan pengoptimalan potensi wisata yang dimiliki, termasuk upaya pengembangan kawasan wisata Telaga Ngebel.

Berdasarkan Pasal 30 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah kabupaten/kota memiliki sejumlah kewenangan, di antaranya:

- a. Merancang dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan tingkat kabupaten/kota.
- b. Menentukan Destinasi Pariwisata serta Daya Tarik Wisata di wilayahnya.
- c. Mengeluarkan Perizinan Berusaha terkait sektor pariwisata.
- d. Mengawasi penyelenggaraan dan tata kelola kepariwisataan di daerahnya.

- e. Mendukung promosi destinasi dan produk pariwisata lokal.
- f. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- g. Menyelenggarakan pelatihan dan riset di bidang pariwisata dalam lingkup kabupaten/kota.
- h. Melindungi dan melestarikan daya tarik wisata yang ada.
- i. Memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pariwisata.
- j. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan kepariwisataan.

Berdasarkan gambaran uraian mengenai situasi, kondisi permasalahan, serta berbagai temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa terdapat sejumlah persoalan yang muncul dalam upaya pengembangan kawasan wisata Telaga Ngebel.

1. Sistem pembelian tiket hanya dapat dilakukan di lokasi dan metode pembayaran masih terbatas hanya dengan uang tunai, belum tersedia metode pembayaran digital seperti QRIS.

2. Belum tersedia Tourism Information Center (TIC) atau pusat informasi pariwisata yang seharusnya menjadi fasilitas utama dalam memenuhi kebutuhan wisatawan.
3. Masih terdapat permasalahan kebersihan, yaitu sampah yang berserakan di sekitar kawasan Telaga Ngebel.

1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan kawasan pariwisata Telaga Ngebel?
2. Aspek apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat Dinas Kebudayaan Pariwisata dalam melakukan pengembangan kawasan pariwisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan kawasan pariwisata Telaga Ngebel.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek yang menjadi faktor pendorong maupun penghambat dalam upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo mengembangkan kawasan pariwisata Telaga Ngebel.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik, terutama dalam memperkuat fungsi dan peran lembaga pemerintahan dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata, dengan mengambil studi kasus pada kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman peneliti mengenai implementasi pengembangan pariwisata di lokasi studi.

2. Manfaat bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi referensi ilmiah untuk studi-studi selanjutnya terkait topik serupa.

3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat.

4. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

1.6. Kajian Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Retha Pramesti, Kismartini, Sri Suwitri (2024) Peran Aktor Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Di Kelurahan randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Journal Of Public policy And Management Review	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan berbagai aktor dalam pengembangan wisata Desa Pelangi di Desa Randusari serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat peran mereka dalam proses tersebut.	Riant Nugroho (2014). Peran actor dalam proses pembangunan - Pembuat Kebijakan (<i>Policy Creator</i>) - Koordinator - Fasilitator - Pelaksana (<i>Implementator</i>) - Pendukung(<i>Aksel etator</i>)	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata Desa Pelangi melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda. Pengambil kebijakan telah berfungsi optimal, namun koordinasi dan pelaksanaan oleh beberapa aktor, termasuk swasta, masih belum maksimal. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, sementara Pokdarwis dan masyarakat menghadapi kendala dalam pengelolaan wisata.
2.	Vivi Alvianita, Ari Subowo, R. Slamet Santoso (2024) Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Dataran	Nugroho dkk (2014). Peran Stakeholders - <i>Policy creator</i> - <i>Koordinator</i> - <i>Fasilitator</i>,	Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder utama, kunci, dan sekunder memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata Dieng, namun keterlibatan mereka belum optimal akibat kendala dalam implementasi program.

No	Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil penelitian
	Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara. Journal Of Public policy And Management Review	Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, serta menganalisis peran mereka dalam proses tersebut.	- <i>Implementor</i>		
3.	Debby Fifiyanti, Janianton Damanik (2021). Pemetaan Peran Dan Kontribusi Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Ekowisata Desa Burai. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasikan peran pemangku kepentingan dan dampaknya terhadap pengembangan ekowisata.	Sekhri (2009). Peran stakeholders dalam pengembangan ekowisata - <i>Regulator</i> - <i>Fasilitator</i> - Pelaksana	Menggunakan Penelitian Kualitatif	Pemangku kepentingan berperan dalam tiga kategori utama, yaitu regulator, fasilitator, dan pelaksana. Klasifikasi peran tersebut ditentukan berdasarkan posisi yang dimiliki dalam kuadran, yang mencakup subjek, pendukung, pemain kunci, serta pengikut.
4.	Febria Gita Maharani, Hasbullah Malau (2022). Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Dalam	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran fasilitator, dinamisator, dan motivator pada	Pitana dan Gayatri (2008;92). Peran Pengembangan Pariwisata - <i>Fasilitator</i> - <i>Dinamisator</i>	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dalam pengembangan wisata Hutan Mangrove di Desa Apar masih belum optimal. Fasilitasi terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana, sedangkan peran dinamisator kurang efektif akibat minimnya

No	Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil penelitian
	Pengembangan Daerah Wisata Hutan Mangrove Di Desa Apar Kota Pariaman. Jurnal Ilmiah bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan	pengembangan hutan mangrove	- <i>Motivator</i>		kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu, peran motivator juga belum maksimal karena pendekatan terhadap investor dan masyarakat masih kurang agresif.
5.	Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, Rusli Isa, Juriko Abdussamad, Arif Bobihu, Mutia Hunaini (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminstrasi dan Pelayanan Publik	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata pada Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango	Firdaus (2020) Peran pemerintah: - <i>Regulator</i> - <i>Dinamisator</i> - <i>Fasilitator</i> - <i>Katalisator</i>	Menggunakan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango masih beragam. Sebagai regulator, pengelolaan pariwisata belum optimal. Peran dinamisator berjalan efektif melalui program tahunan, sementara sebagai fasilitator, pemerintah telah menyediakan fasilitas pemasaran berbasis teknologi. Namun, peran sebagai katalisator dalam percepatan pengembangan daerah masih perlu ditingkatkan.

No	Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil penelitian
6.	Susi Iswanti, Zulkarnaini (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Ilmu Administrasi Publik	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.	Pitana dan Gayatri (2005) Peran Pemerintah Daerah - <i>Motivator</i> - <i>Fasilitator</i> - <i>Dinamisator</i>	Kualitatif Deskriptif	Peran pemerintah desa dalam pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan sudah sesuai dengan ketiga indikator peran tersebut, namun masih terdapat kekurangan seperti rendahnya SDM, minimnya partisipasi masyarakat setempat dalam mengembangkan objek tersebut dan minimnya modal untuk pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan.
7.	Eet Saeful Hidayat, R Didi Djadjuli (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. Jurnal Ilmu administrasi Negara	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dari pemerintah desa dalam pengembangan Objek Wisata Curug	Siagian (2018:142-150). Peran Pemerintah - <i>Stabilisator</i> - <i>Inovator</i> - <i>Modernisator</i> - <i>Pelopop</i>	Kualitatif Deskriptif	Peran pemerintah Desa Raksabaya sudah memenuhi indikator dari keempat peran tersebut dapat dilihat dari beragamnya fasilitas yang dimiliki serta adanya perbaikan dari infrastruktur pendukung, namun masih terdapat hambatan seperti kurangnya SDM yang memadai dan juga rendahnya partisipasi dari Masyarakat setempat.
8.	Endah Dwi Lestari, Yoseb Boari, Melyanus Bonsapia, Silas Marcelino Anes	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Peran Pemerintah Terhadap	Kuncoro (2004), Peran Pemerintah - Koordinator - Fasilitator	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Di Kabupaten Biak Numfor, terdapat empat program utama yang dijalankan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata. Program-program tersebut meliputi: pengembangan destinasi

No	Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil penelitian
	(2023). Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. <i>Journal of Economics Review (JOER)</i>	Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor.	- Stimulator - Motivator		pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kemitraan, serta pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Keempat inisiatif ini menjadi fokus utama Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor dalam mengembangkan potensi objek-objek wisata di daerah tersebut.
9.	Essa Rella Pangestu, Nunik Retno Herawati, dan Neny Marlina (2025). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Untuk Mewujudkan <i>Community Based Tourism (CBT)</i> . <i>Journal of Politic and Government Studies</i>	Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa Wisata Pandansari sebagai bagian dari realisasi konsep <i>Community-Based Tourism (CBT)</i> .	Pitana dan Gayantri (2005) Peran Pemerintah - Motivator, - Fasilitator, dan - Dinamisator	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wisata Pandansari telah melalui ketiga tahapan pemberdayaan. Beberapa pihak yang terlibat antara lain Pemerintah Kecamatan Warungasem dan Disporapar Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai fasilitator, serta Disparpora Kabupaten Batang yang berperan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator, meskipun peran terakhir ini masih terbatas. Pemerintah Desa Pandansari sendiri lebih berperan dalam hal administratif dan penyaluran. Meski keterlibatan pemerintah terbatas, penerapan konsep <i>Community-Based Tourism (CBT)</i> tetap berhasil, berkat peran aktif komunitas lokal Kopal Etom dan dukungan pemerintah dalam peningkatan kapasitas masyarakat.

No	Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil penelitian
10.	Carol Ratna Alyssa Nainggolan, Fitriyah, Supratiwi. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata kabupaten Samosir (Studi Pada Kampung Ulos Hutaraja). <i>Journal of Politic and Government Studies</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Samosir dalam pengembangan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutannya.	Pitana dan Gayantri (2005) Peran Pemerintah - Motivator, - Fasilitator, dan - Dinamisator	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berperan dominan sebagai dinamisator dalam pengembangan pariwisata Kampung Ulos Hutaraja. Meski juga berperan sebagai motivator dan fasilitator, fokus utama pemerintah adalah mendorong kegiatan pariwisata melalui kolaborasi dengan pihak ketiga. Dukungan atraksi, fasilitas, dan infrastruktur turut memperkuat pengembangan, namun kendala seperti akses transportasi dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan terpadu untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh peneliti

Berdasarkan hasil telaah terhadap sepuluh penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian tersebut menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait peran aktor dan pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah.

Penelitian pertama dilakukan oleh Pramesti *et al.* (2024), Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran berbagai aktor yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata Kampung Pelangi yang berlokasi di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor berjalan secara beragam, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, namun beberapa aktor seperti pihak swasta belum menjalankan peran secara optimal. Koordinasi dan sinergi antaraktor masih menjadi kendala dalam proses pengembangan wisata.

Penelitian kedua dilakukan oleh Alvianita *et al.*, (2024), membahas mengenai peran para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses pengembangan sektor pariwisata di kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dalam penelitian ini, stakeholder diklasifikasikan menjadi aktor primer, kunci, dan sekunder, dengan peran masing-masing sebagai policy creator, koordinator, fasilitator, dan implementor. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder belum optimal karena berbagai kendala di lapangan, termasuk koordinasi program dan pembagian peran yang belum merata.

Penelitian ketiga berasal dari Fifiyanti & Damanik (2021), yang meneliti pengembangan ekowisata di Desa Burai. Penelitian ini menekankan pentingnya pemetaan peran dan kontribusi pemangku kepentingan. Ditemukan bahwa stakeholder berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana. Klasifikasi peran tersebut dikaitkan dengan posisi kekuatan mereka dalam kuadran partisipasi, yaitu sebagai subjek, pemain kunci, pendukung, dan pengikut. Penelitian ini menyoroti perlunya sinergi antar peran agar pengembangan ekowisata dapat berjalan efektif.

Selanjutnya, penelitian keempat oleh Gita Maharani & Malau (2022), mengkaji peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dalam upaya pengembangan destinasi wisata Hutan Mangrove di Desa Apar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dinas sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator masih belum terlaksana secara optimal dan efektif. Terhambatnya fasilitas dan sarana pendukung menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan wisata tersebut.

Penelitian kelima oleh Tui *et al.* 2023) mengangkat pengembangan potensi wisata di wilayah pesisir Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sebagai dinamisator dan fasilitator sudah cukup baik, dibuktikan dengan adanya program tahunan dan dukungan teknologi promosi wisata. Namun, peran sebagai katalisator dan regulator belum maksimal, terutama dalam hal penataan dan kebijakan strategis untuk percepatan pembangunan sektor pariwisata.

Penelitian keenam dilakukan oleh Susi Iswanti & Zulkarnaini (2022), berfokus pada peran pemerintah desa dalam pengembangan destinasi wisata Pulau Tilan yang terletak di Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berfungsi secara efektif sebagai motivator, fasilitator, serta dinamisor dalam proses pengembangan pariwisata di wilayah tersebut. Namun, pengembangan wisata masih menemui kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya modal, serta kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan objek wisata.

Penelitian ketujuh oleh Hidayat & Djadjuli (2020), menelaah peran Pemerintah Desa Raksabaya dalam proses pengembangan destinasi wisata Curug Kembar, dengan menyoroti kontribusi serta upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi wisata di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan indikator peran pemerintah sebagai pelopor, inovator, modernisator, dan stabilisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai fasilitas telah tersedia dan infrastruktur mulai dibangun, hambatan berupa kurangnya SDM dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi masalah utama dalam pengembangan destinasi wisata tersebut.

Penelitian kedelapan berasal dari Lestari *et al.* (2023), Penelitian ini mengkaji peran pemerintah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. Melalui Dinas Pariwisata, pemerintah daerah melaksanakan empat program pokok, yaitu pengembangan destinasi wisata, peningkatan promosi dan pemasaran, penguatan kemitraan, serta pembangunan

sarana dan prasarana. Keempat program ini menjadi pilar utama dalam upaya peningkatan potensi objek wisata di wilayah tersebut, meskipun tantangan infrastruktur masih perlu ditangani.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Pangestu *et al.* (2025), yang menyoroti peran pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat guna mengimplementasikan konsep Community-Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Pandansari. Masyarakat dinilai telah mencapai ketiga tahap pemberdayaan, meskipun peran pemerintah belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan penerapan CBT lebih banyak didorong oleh inisiatif komunitas lokal seperti Kopal Etom, serta peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Nainggolan (2023), yang meneliti peran Pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya pengembangan destinasi wisata Kampung Ulos Hutaraja. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dominan sebagai dinamisator dalam mendorong pengembangan potensi wisata di kawasan tersebut, meskipun tetap menjalankan peran sebagai fasilitator dan motivator. Tantangan utama dalam pengembangan wisata adalah keterbatasan akses transportasi dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih menyeluruh dan kolaboratif untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

1.6.2. Administrasi Publik

Menurut Marliani (2019), mengutip pandangan Herbert Simon, administrasi dapat dipahami sebagai proses kolaboratif yang dilakukan oleh sekelompok individu dalam rangka meraih tujuan bersama. Sementara itu, Pasolong dalam referensi yang sama menjelaskan bahwa administrasi memiliki dua dimensi penting: karakteristik dan unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Dimensi karakteristik tersebut mencakup aspek efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas. Dengan demikian, pelaksanaan administrasi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan keahlian dan kemampuan kerja guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pendekatan yang logis dan efisien.

Administrasi publik, menurut Chandler & Plano dalam Pasolong (2019), adalah serangkaian tindakan yang mengelola sumber daya dan staf publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik. Kuasa politik dalam administrasi ini dapat berasal dari sistem birokrasi atau warisan. Administrasi publik juga dapat dipahami sebagai seni dan ilmu yang meliputi teori dan praktik, memberikan panduan bagi pelaksana publik dalam menjalankan tugas-tugas publik. Ilmu administrasi publik digunakan untuk menangani berbagai masalah yang muncul di masyarakat melalui pengelolaan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi, memperbaiki, atau menyempurnakan isu-isu tersebut. Istilah "*public administration*" sangat terkait dengan konteks pemerintahan dan kebijakan, yang mencerminkan tingkat kepekaan pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini penting agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengertian ini, administrasi publik dapat

dipahami sebagai kumpulan tindakan yang mengatur sumber daya dan staf pemerintah untuk merumuskan, menerapkan, dan mengelola kebijakan publik.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik merujuk pada kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam bidang administrasi publik. Seiring waktu, berbagai paradigma telah muncul dan berkembang dalam sejarah studi administrasi publik. Menurut Nicholas Henry dalam Thoha (2017), mencatat adanya ambiguitas dalam pengertian administrasi negara, sehingga ia merekomendasikan untuk memahami administrasi negara melalui paradigma administrasi publik. Menurut Henry, terdapat enam paradigma utama yang menjadi panduan dalam kajian administrasi publik

Paradigma 1: The politics administration dichotomy atau dikotomi administrasi publik (1900-1926)

Paradigma dikotomi dalam administrasi politik menekankan pemisahan antara fungsi administrasi pemerintahan dan politik sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Paradigma ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan teori administrasi publik dan memberikan orientasi ilmiah pada bidang ini dengan berusaha membedakan antara fakta dan nilai (Henry, 2015). Wilson (1887), Terdapat empat syarat utama yang dianggap penting untuk mewujudkan administrasi publik yang efektif, yakni: (1) adanya pemisahan yang jelas antara ranah politik dan administrasi; (2) memahami

keterkaitan antara organisasi sektor swasta dan dunia politik; (3) meningkatkan efisiensi kerja melalui penerapan praktik serta sikap profesional sebagaimana diterapkan dalam dunia bisnis pada aktivitas operasional sehari-hari; dan (4) memperkuat efektivitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas manajemen, pelatihan bagi aparatur sipil negara, serta penerapan sistem penilaian kinerja berbasis prestasi. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak boleh menjadi apolitis dalam melayani publik, mereka harus menghindari mendukung kepentingan politik tertentu. Paradigma ini memiliki kekurangan karena hanya menekankan aspek lokus, yaitu birokrasi pemerintah, dan kurang membahas administrasi publik secara menyeluruh. Dengan mengaitkan paradigma ini pada dikotomi nilai dan fakta, konsep politik dan administrasi menjadi lebih kuat. Akibatnya, penelitian yang dilakukan oleh para ahli administrasi publik di lembaga eksekutif dianggap memiliki nilai warna dan legitimasi karena bersifat "faktual" dan "ilmiah". Sementara itu, penelitian mengenai pembuatan kebijakan publik dan topik terkait biasanya diserahkan kepada ilmuwan politik.

Paradigma 2: *The principles of administration* atau prinsip-prinsip administrasi (1927–1937).

Paradigma prinsip-prinsip administrasi menandai kemajuan menuju orientasi manajemen dengan menjadikan administrasi publik sebagai ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan keyakinan bahwa terdapat prinsip-prinsip ilmiah tertentu dalam administrasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Karena memiliki sifat ilmiah, prinsip-

prinsip ini dapat diterapkan di seluruh aspek administratif, termasuk budaya, fungsi, misi, dan kerangka kelembagaan. Gulick & Urwick (2004), mengidentifikasi tujuh prinsip administrasi yang dikenal dengan akronim POSDCORB, yang mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Prinsip-prinsip ini disebut sebagai *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting* adalah tujuh prinsip administrasi (Gulick & Urwick, 2004). Paradigma ini percaya bahwa prinsipnya berlaku di mana saja termasuk di pemerintahan, jadi lokusnya tidak pernah diungkapkan, akibatnya fokusnya lebih penting daripada lokusnya.

Paradigma 3: *Public administration as political science* atau administrasi publik sebagai ilmu politik (1950–1970)

Pada paradigma ketiga, administrasi publik dipandang sebagai cabang dari ilmu politik, yang mencerminkan upaya para ilmuwan politik untuk merebut kembali kendali atas disiplin administrasi publik. Di sisi lain, para ahli teori manajemen juga berupaya mendapatkan pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam disiplin ini. Menurut Basheka (2012), periode ini ditandai dengan semakin kaburnya batas antara politik dan administrasi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam konteks pemerintahan, politik dan administrasi tidak dapat sepenuhnya dipisahkan. Basheka juga mencatat bahwa pada tahun 1930-an, konsep politik diperluas secara ilmiah untuk mencakup proses pembuatan kebijakan publik

Simon (2018), berpendapat bahwa administrasi dan politik adalah satu sama lain. Saat ini, upaya untuk mengembalikan hubungan teoritis antara ilmu politik dan administrasi negara sedang berlangsung. Paradigma ini menggambarkan administrasi publik sebagai ilmu politik. Dalam paradigma ini, birokrasi pemerintahan adalah lokusnya dan fokusnya kabur karena ilmu politik dianggap dominan dalam administrasi publik saat ini, administrasi publik mengalami krisis identitas.

Paradigma 4: Public administration as a management atau administrasi publik sebagai manajemen (1956-1970)

Di sini, istilah administrasi mengacu pada semua bidang organisasi dan manajemen, dengan tujuan dan niat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program secara lebih tepat. Fokus di sini lebih penting daripada lokusnya. Sangat jelas bahwa dua disiplin ilmu yang bersaing untuk menguasai administrasi publik hampir tidak berubah pada tahap ketiga dan keempat. Sebaliknya, mereka berkonsentrasi pada bidang studi dan ilmu pengetahuan yang baru diakui.

Paradigma 5: *Public administration as public administration* atau administrasi publik sebagai administrasi publik (NPM) (1970–1990)

Saat ini, terdapat upaya untuk mengembalikan administrasi publik ke statusnya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Namun, dalam proses ini, fokus yang sebelumnya berpusat pada birokrasi hirarkis telah bergeser ke arah pasar dan organisasi sektor swasta. Peralihan ini menyebabkan perubahan dari

model administrasi publik yang konvensional dan tradisional ke model New Public Management (NPM). Pergeseran paradigma ini tidak terjadi pada detail tertentu, melainkan melalui tiga aliran utama: paradigma tradisional, paradigma NPM, dan paradigma governance. Seperti pendekatan sebelumnya, NPM muncul sebagai respons terhadap masalah inefisiensi dalam sistem administrasi publik. Model ini menggabungkan teknik manajemen sektor swasta dengan teori ekonomi, yang secara bertahap menggantikan pendekatan administrasi publik konvensional. Pada saat yang sama, paradigma governance mulai berkembang sebagai alternatif. Peters berpendapat bahwa banyak praktisi cenderung melihat governance sebagai bagian dari NPM. Namun, meskipun sebagian besar perubahan dalam administrasi publik dapat dikategorikan sebagai NPM, terdapat pula sejumlah perubahan yang muncul dari praktik dan gagasan yang berbeda. Di satu sisi, beberapa praktisi mulai mengarahkan manajemen sektor publik ke model yang diadopsi dari sektor swasta, dengan mempertimbangkan pendekatan manajemen bisnis. Di sisi lain, praktisi lain mengembangkan konsep yang berbeda mengenai hubungan antara sektor publik dengan sektor swasta, yang akhirnya dikenal sebagai governance.

Paradigma 6: Governance atau pemerintahan (1990-sekarang)

Paradigma governance memiliki asal-usul dan hubungan konseptual yang sejalan dengan *New Public Management* (NPM). Keduanya merupakan aliran administrasi publik yang berkembang dari ideologi neoliberal, yang diadopsi oleh banyak negara anggota OECD pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Menurut

Peters (2018), kedua paradigma ini saling melengkapi satu sama lain. Keduanya bertujuan untuk menghapus sistem pemerintahan yang hierarkis dan top-down yang diwariskan dari masa lalu, sehingga banyak rekomendasi yang dihasilkan oleh kedua pendekatan tersebut cenderung serupa, seperti desentralisasi fungsi pemerintahan. Paradigma governance telah memainkan peran penting dalam perkembangan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan di berbagai negara. Paradigma ini mencerminkan perubahan pandangan terhadap model pemerintahan yang lebih terbuka, berorientasi pada pelayanan publik, serta berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Peters (2018), terdapat perbedaan yang lebih jelas antara NPM dan paradigma governance. Dalam NPM, keterlibatan aktor non- pemerintah bertujuan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan membatasi kekuasaan negara. Sementara itu, dalam pendekatan governance, meskipun elemen efisiensi tetap ada, fokus utamanya adalah melibatkan masyarakat sipil, mengakui kapasitas jaringan masyarakat sipil, serta mendorong partisipasi publik. Tujuannya adalah untuk memberikan masyarakat tingkat pengelolaan mandiri dalam berbagai bidang kebijakan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan pandangan para ahli, administrasi publik merupakan proses kerja sama yang sistematis dan terorganisir, yang melibatkan aktor-aktor pemerintahan dalam merancang dan menjalankan kebijakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan negara. Esensi dari administrasi publik terletak pada kemampuannya dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks pengelolaan pariwisata,

pendekatan administrasi publik menjadi instrumen penting dalam memahami peran berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori administrasi publik sebagai dasar konseptual untuk menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan kawasan wisata Telaga Ngebel. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi peran strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, menyediakan infrastruktur, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan destinasi wisata. Pemilihan kawasan Telaga Ngebel sebagai objek studi didasarkan pada potensinya sebagai ikon wisata unggulan Kabupaten Ponorogo, sekaligus tantangan nyata terkait keterbatasan infrastruktur dan kesadaran lingkungan masyarakat.

Penelitian ini menempatkan posisinya dalam paradigma keenam administrasi publik, yaitu *governance*, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan, dan akuntabel. Paradigma *governance* dipilih karena menyoroti peran strategis dari berbagai aktor, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil, dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. *Governance* tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai pelaku tunggal dalam penyelenggaraan administrasi publik, melainkan sebagai bagian dari jejaring yang berfungsi membangun sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dalam konteks pengembangan Telaga Ngebel, pendekatan *governance* relevan untuk mengevaluasi efektivitas program yang dijalankan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, dengan memperhatikan sejauh mana prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan wisata Telaga Ngebel, serta menilai sejauh mana kolaborasi antaraktor mampu menjawab permasalahan yang ada, seperti keterbatasan sarana parkir, persoalan pengelolaan sampah, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia pada lembaga-lembaga lokal.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memberikan gambaran mengenai peran dinas terkait, tetapi juga mengidentifikasi hambatan dan peluang strategis dalam pengembangan kawasan wisata. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas tata kelola destinasi wisata di daerah, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan mengenai paradigma-paradigma administrasi publik, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam paradigma keenam, yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Paradigma governance memberikan perhatian khusus pada peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, dalam menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan dialog konstruktif. Dalam konteks ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi sangat relevan, karena memfasilitasi kerjasama antara pihak-

pihak terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi yang inovatif, serta memastikan keberhasilan implementasi program- program yang telah disusun. Dengan melibatkan beragam perspektif dan keahlian, pendekatan ini tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Kerjasama yang terjalin antara berbagai aktor ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi program peningkatan sumber daya manusia, serta membantu mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.6.4. Manajemen Publik

Woodrow Wilson dikenal sebagai pelopor dalam bidang manajemen publik dan pada tahun 1887 ia menulis karya penting berjudul *The Study of Administration*. Dalam tulisannya, ia menyoroti perlunya reformasi pada fungsi eksekutif dalam lembaga pemerintahan yang kala itu dinilai telah menyimpang akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia mendorong penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis sebagai solusi. Wilson juga mengemukakan empat prinsip fundamental dalam studi administrasi publik, (Keban, 2014) yakni: (1) Pemerintahan sebagai konteks utama organisasi, (2) Fokus utama pada fungsi eksekutif, (3) Upaya menemukan prinsip serta teknik manajemen yang efektif guna mengembangkan kapasitas administrasi, dan (4) Penggunaan metode perbandingan sebagai pendekatan studi serta pengembangan administrasi publik. Sementara itu, menurut Donovan dan Jackson dalam Keban (2014), manajemen mencakup

sejumlah fungsi penting yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penempatan sumber daya manusia (staffing), kepemimpinan (leading), serta pengawasan (controlling). Sejalan dengan hal tersebut, (Satibi, 2023) menyatakan bahwa esensi utama dari manajemen publik adalah mampu menghasilkan layanan berkualitas yang sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen publik diarahkan pada upaya pengelolaan sektor publik secara profesional dan proporsional, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi maupun potensi yang dimiliki. Bukan hanya sebatas proses pengelolaan, namun manajemen publik diharapkan mampu menciptakan hasil nyata yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Dalam pelaksanaannya, manajemen publik didasari oleh beberapa prinsip utama yang menjadi landasan efektivitas, yaitu:

1. Akuntabilitas, yaitu semua proses harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai rencana awal;
2. Transparansi, berarti terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan;
3. Responsivitas, yaitu mempertimbangkan kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat;
4. Efektivitas, yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan target yang telah dirancang;
5. Efisiensi, yakni penggunaan sumber daya secara optimal dan sesuai kebutuhan;

6. Adaptabilitas, berarti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat;
7. Rasionalitas, yang artinya kebijakan dapat dipahami secara logis, tidak dibuat-buat, serta memiliki tujuan yang jelas;
8. Profesionalisme, yaitu pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, keahlian, dan pengalaman yang relevan.

Dalam konteks pengembangan potensi pariwisata di kawasan Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo, prinsip-prinsip manajemen publik tersebut menjadi sangat penting. Manajemen kebijakan yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan dan memaksimalkan segala bentuk upaya yang telah dilakukan. Apabila pengorganisasian suatu kebijakan tidak dilakukan dengan pengetahuan yang memadai, maka kualitas hasil dari kebijakan tersebut akan menurun dan tujuan tidak akan tercapai secara optimal.

1.6.5. Peran

Dalam suatu organisasi atau sistem sosial, istilah *peran* merujuk pada ekspektasi terhadap tindakan, tanggung jawab, serta perilaku dari individu atau posisi tertentu. Khususnya dalam konteks administrasi publik, peran ini bisa mencakup berbagai pihak seperti pegawai negeri, pimpinan, institusi pemerintahan, dan aktor organisasi lainnya. Masing-masing individu yang berada dalam organisasi publik memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda-beda, yang menjadi bagian penting dari keseluruhan sistem. Manajemen publik berperan dalam

mengatur dan mengelola pelaksanaan peran-peran tersebut, termasuk melakukan pemantauan, penataan, dan penilaian atas kinerja individu dalam organisasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap peran dijalankan dengan cara yang efektif. Peran yang dimainkan oleh individu-individu tersebut menjadi unsur vital dalam praktik administrasi maupun manajemen publik, karena melalui pelaksanaan peran yang tepatlah tujuan-tujuan organisasi dapat direalisasikan.

Menurut Winkler, (2009) *peran* diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dalam suatu situasi atau peristiwa tertentu. Dari pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan yang dimaksud merujuk pada perilaku atau sikap yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang menempati posisi atau kedudukan tertentu dalam lingkungan sosial atau masyarakat.

Soekanto, (2002) menyatakan bahwa peran merupakan wujud dinamis dari suatu kedudukan atau status sosial. Seseorang dikatakan menjalankan perannya ketika ia melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada posisi sosial yang dimilikinya. Kedudukan dan peran memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling memengaruhi serta menentukan satu sama lain. Setiap individu pada dasarnya memiliki beragam peran sosial yang terbentuk melalui pola-pola interaksi dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dengan kata lain, peran tidak hanya mencerminkan tindakan seseorang dalam masyarakat, tetapi juga menggambarkan jenis peluang atau kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya.

Menurut Soekanto, (2002) peran dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif.

- a. Peran aktif merujuk pada tanggung jawab yang diemban oleh individu dalam suatu kelompok sebagai bagian dari aktivitas kolektif, misalnya sebagai pengurus atau pejabat.
- b. Peran partisipatif adalah kontribusi yang diberikan oleh anggota kelompok demi kepentingan bersama, di mana partisipasinya sangat bermanfaat bagi kelompok tersebut.
- c. Peran pasif merupakan bentuk keterlibatan tidak langsung, di mana anggota kelompok memilih untuk tidak terlalu dominan agar fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan secara optimal.

Sementara itu, Cortright *et al.*, (2020) mendefinisikan peran sebagai suatu status hukum yang mencakup tugas, fungsi, serta wewenang penegak hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan perspektif ini, peran dapat dibedakan menjadi:

- a. Peran normatif, yaitu peran yang dijalankan oleh suatu lembaga berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- b. Peran ideal, yakni peran yang seharusnya dilakukan oleh suatu lembaga sesuai dengan nilai-nilai ideal dan kedudukannya dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual, yang menggambarkan peran nyata yang diambil oleh seseorang atau lembaga berdasarkan kondisi riil di lapangan atau realitas sosial.

Soraya juga menjelaskan bahwa peran sebuah lembaga tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsinya, di mana kedua aspek ini saling berkaitan dalam kinerja individu maupun organisasi. Tugas didefinisikan sebagai serangkaian kewajiban yang harus diselesaikan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan persn yang diembannya. Sementara itu, fungsi merujuk pada nilai guna atau manfaat tertentu. Dalam konteks kelembagaan, fungsi mencakup wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tertentu. Selain itu, fungsi suatu institusi formal dirancang berdasarkan panduan atau arahan yang menjadi landasan operasional organisasi dalam menjalankan aktivitasnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 150 Tahun 2021, memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Dinas ini bertanggung jawab dalam mengelola potensi wisata daerah, merencanakan serta melaksanakan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan daya tarik wisata, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Selain itu, Disbudparpora juga memiliki fungsi pembinaan terhadap pelaku usaha dan kelompok masyarakat agar terwujud sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Disbudparpora Kabupaten Ponorogo melaksanakan lima strategi utama, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan Teknis

Dinas berperan dalam menyusun kebijakan teknis yang berbasis pada analisis kebutuhan dan potensi wilayah. Kebijakan tersebut bertujuan menjawab tantangan aktual, seperti peningkatan kualitas destinasi wisata, penguatan promosi digital, serta pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata.

2. Pelaksanaan Kebijakan

Setelah kebijakan teknis dirumuskan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA), Disbudparpora bertanggung jawab mengimplementasikannya melalui koordinasi lintas sektor, pengelolaan sumber daya, serta pengawasan dan evaluasi program, khususnya pada pengembangan destinasi unggulan seperti Telaga Ngebel.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Dinas menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Community Based Tourism (CBT) yang menekankan pemerataan manfaat ekonomi, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

4. Tata Kelola Destinasi

Disbudparpora memastikan tata kelola destinasi wisata dilaksanakan secara terpadu, mencakup pengaturan fasilitas fisik, koordinasi

antarinstansi, dan keterlibatan pelaku wisata serta masyarakat untuk menjamin keberlanjutan destinasi.

5. Pengembangan Industri Pariwisata

Sektor pariwisata dikembangkan sebagai penggerak ekonomi berbasis kearifan lokal. Melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan terhadap pelaku usaha kreatif, Dinas berupaya memperkuat kapasitas masyarakat dan mendorong tumbuhnya industri pariwisata berkelanjutan.

Dengan demikian, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa lembaga ini berperan penting dalam membangun sektor pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang sinergis antara kebijakan, pelaksanaan program, dan pemberdayaan masyarakat, Disbudparpora tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, serta penguatan identitas daerah.

1.6.6. Peran Pemerintah

Muhtar Haboddin (dalam Alfianto & Fauzi, 2021) mendefinisikan peran pemerintah sebagai serangkaian kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan negara dan berlandaskan pada dasar negara, yang mencakup hubungan dengan warga negara dan wilayah dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Sementara itu, Ryass Rasyid dalam Labolo (2023), mengklasifikasikan peran pemerintah menjadi tiga fungsi utama:

a. Fungsi Regulasi

Pemerintah bertindak sebagai pengatur dengan menetapkan kebijakan untuk menciptakan keseimbangan dalam proses pembangunan. Melalui penerbitan berbagai peraturan, pemerintah menciptakan kerangka hukum yang menjadi pedoman masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan. Peraturan ini juga berfungsi untuk menciptakan efektivitas dan ketertiban administratif dalam pembangunan.

b. Fungsi Fasilitasi

Sebagai penyedia fasilitas, pemerintah menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Hal ini diwujudkan melalui upaya menjembatani berbagai kepentingan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam menyediakan sarana prasarana, pendampingan, serta dukungan pendanaan untuk menciptakan kondisi yang tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

c. Fungsi Motivasi

Pemerintah berperan sebagai pendorong dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Peran ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program-program pemerintah, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dalam konteks pengembangan pariwisata, peran berbagai aktor menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program. Berdasarkan pandangan Nugroho (2014), aktor-aktor tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun saling terkait untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan sektor pariwisata.

1. Pembuat kebijakan (*policy creator*)

Memegang peran sentral dalam merancang regulasi dan menentukan arah pengembangan pariwisata. Mereka bertugas merumuskan aturan yang mengatur perkembangan pariwisata, termasuk penetapan lokasi objek wisata, nilai kompensasi bagi pihak terdampak, serta pedoman pelaksanaan konstruksi. Selain itu, mereka juga berwenang mengeluarkan peraturan terkait pembangunan kawasan wisata dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul selama proses pengembangan.

2. Koordinator

Sangat penting dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan secara terorganisir. Aktor ini bertugas mengoordinasikan berbagai aktivitas, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan program. Mereka juga menyelenggarakan rapat-rapat konsultasi dengan masyarakat dan memastikan proses pengembangan objek wisata berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, koordinator berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

3. Fasilitator

Berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung, termasuk anggaran, infrastruktur, dan peralatan operasional. Mereka juga bertugas

mengumpulkan data fisik dan hukum yang diperlukan dalam perencanaan pariwisata. Ketersediaan fasilitas seperti akomodasi, transportasi, dan jaringan komunikasi sangat menentukan daya tarik suatu destinasi. Oleh karena itu, peran fasilitator sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pariwisata.

4. Pelaksana (*implementor*)

Merupakan aktor yang bertanggung jawab langsung dalam operasionalisasi program. Tugas mereka meliputi identifikasi dan inventarisasi data, pengelolaan administrasi tanah, serta penyediaan informasi kepada pihak terkait. Selain itu, mereka juga mengawasi proses pembangunan fisik di lokasi wisata dan memastikan seluruh dokumentasi terselesaikan dengan baik.

5. Akselerator

Berfungsi sebagai pendorong agar program dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun tidak memiliki kepentingan langsung dalam kebijakan, aktor ini memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan pariwisata. Contohnya adalah Dinas Pariwisata, yang aktif merancang strategi, memantau perkembangan, dan mendukung berbagai inisiatif untuk memajukan sektor ini.

Menurut Mathis (2008), terdapat tiga kategori utama peran aktor dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata, yaitu:

1. Pembuat kebijakan, yakni pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun regulasi dan kebijakan strategis yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

2. Fasilitator, yaitu pihak yang menyediakan bantuan dan sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat lokal untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan pariwisata.
3. Pelaksana dan pengelola, yakni aktor yang terlibat langsung dalam operasionalisasi serta pengelolaan kawasan wisata untuk memastikan pengembangan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai actor mulai dari perumus kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, hingga akselerator menjadi fondasi penting dalam menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Berdasarkan berbagai pandangan tentang peran pemerintah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah memiliki sejumlah tanggung jawab yang melekat pada lembaga atau organisasi publik. Tugas-tugas ini berkaitan dengan hukum publik, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh fungsi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.

1.6.7. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata didefinisikan sebagai upaya meningkatkan kualitas suatu objek wisata agar lebih menarik, baik dari segi lokasi maupun fasilitas yang tersedia, sehingga mampu mendorong kunjungan wisatawan (Giantari & Barreto, 2019). Rachmad *et al.*, (2021) menekankan bahwa dalam membangun pariwisata, industri ini harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar atau dasasila, meliputi aspek

politik, pemerintahan, keingintahuan, keramahan, jarak dan waktu, atraksi, akomodasi, transportasi, harga, promosi, serta kesempatan berbelanja. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi daerah yang ingin mengembangkan pariwisata agar perencanaannya efektif dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.

Menurut Pitana & Diarta, (2009) pengembangan pariwisata merupakan proses berkelanjutan untuk memajukan sektor ini melalui kebijakan dan perencanaan strategis. Sementara itu, Dredge, (2013) berpendapat bahwa pengembangan destinasi wisata harus mempertimbangkan budaya, sejarah, dan kondisi ekonomi lokal. Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan tidak hanya mendorong peningkatan minat wisatawan, tetapi juga memperkuat karakter khas daerah dan memberikan dampak positif terhadap taraf hidup komunitas lokal. Untuk mencapai keberhasilan, pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek pendukung, seperti aksesibilitas (transportasi dan pemasaran), infrastruktur, interaksi sosial, keterkaitan dengan sektor lain, ketahanan terhadap dampak pariwisata, serta penerimaan masyarakat lokal.

Giantari & Barreto (2019) menyatakan bahwa tujuan pengembangan pariwisata adalah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan wisatawan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, budaya, seni, dan keindahan alam melalui pendekatan terpadu, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan pemasaran.

Menurut Yoeti, (2008), pengembangan sektor pariwisata harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental sebagai berikut:

1. Keberlanjutan lingkungan, yaitu upaya pengembangan yang tetap menjaga kelestarian daya tarik wisata secara ekologis.
2. Keberlanjutan sosial dan budaya, di mana pengembangan pariwisata mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan serta budaya lokal.
3. Keberlanjutan ekonomi, yaitu menjamin agar aktivitas pariwisata mampu mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, artinya pariwisata harus memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat langsung dari aktivitas wisata di wilayahnya.

Cooper dkk. (dalam Sunaryo, 2013) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari empat komponen utama:

1. Atraksi Wisata

Elemen kunci untuk menarik wisatawan, meliputi atraksi alam (gunung, pantai), budaya (tradisi, festival), dan buatan manusia (event olahraga, pameran).

2. Aksesibilitas

Kemudahan mencapai destinasi, mencakup transportasi, petunjuk arah, biaya, dan waktu tempuh.

3. Amenitas

Fasilitas pendukung seperti akomodasi, restoran, dan hiburan yang

meningkatkan kenyamanan wisatawan.

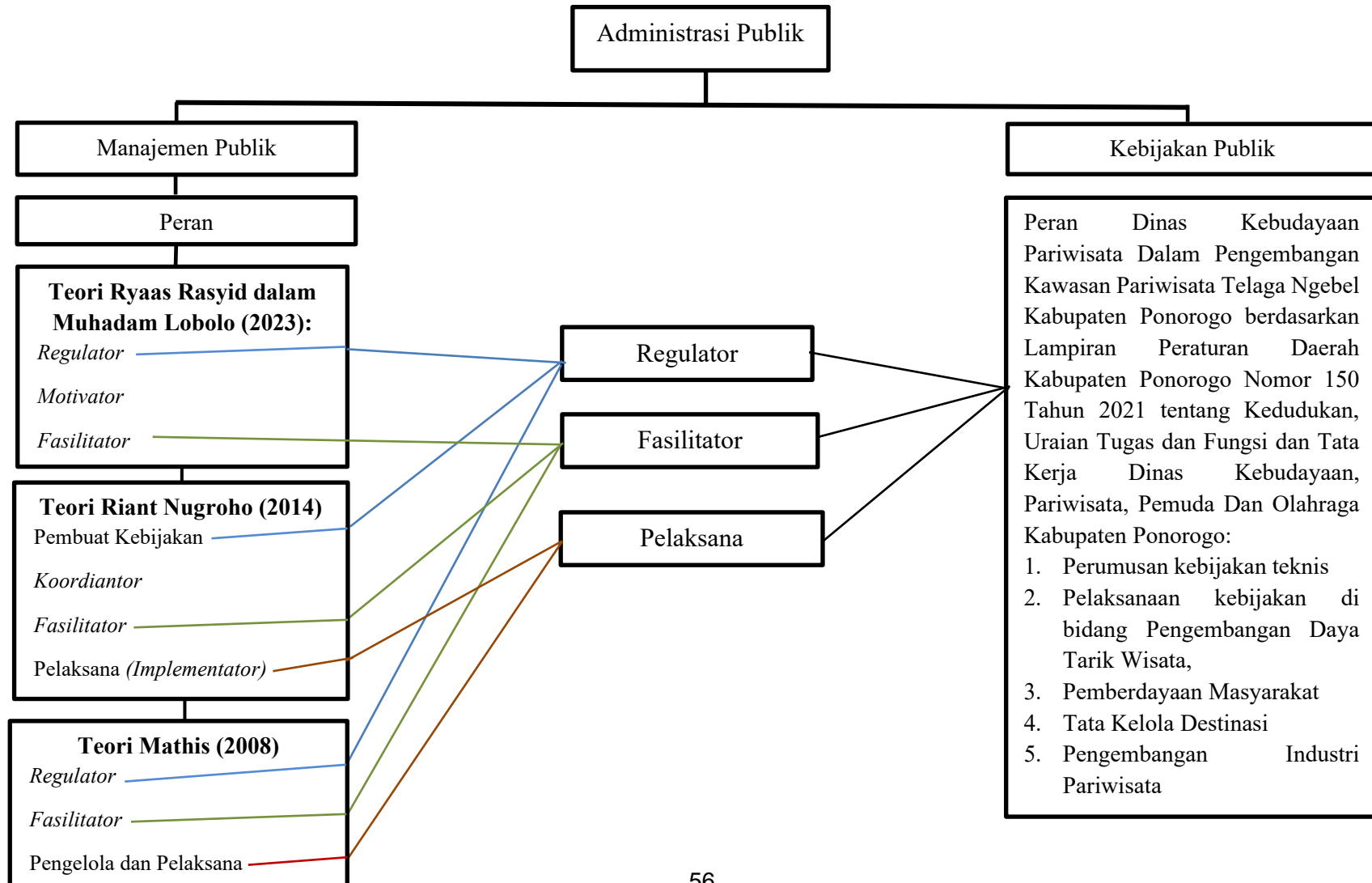
4. Fasilitas Pendukung (*Ancillary Service*)

Layanan tambahan seperti perbankan, telekomunikasi, dan kesehatan yang mendukung kegiatan wisata.

Menurut Carter & Febricius dalam Sunaryo (2013), perencanaan destinasi wisata harus mencakup:

1. Pengembangan atraksi Menciptakan daya tarik yang memotivasi kunjungan wisatawan.
2. Penyediaan amenitas dan akomodasi Fasilitas dasar seperti transportasi, penginapan, dan pusat informasi untuk kenyamanan wisatawan.
3. Peningkatan aksesibilitas Memastikan kemudahan mencapai destinasi melalui sarana transportasi dan penunjuk arah.
4. Pembangunan citra (*image building*) Membentuk persepsi positif melalui positioning yang konsisten, mencakup kualitas produk, pemasaran, dan harga.

1.7. Kerangka Berpikir



1.8. Operasionalisasi Konsep

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan secara mendalam temuan-temuan yang diperoleh dengan menguraikan berbagai permasalahan berdasarkan kondisi lapangan yang menjadi objek studi. Studi ini mengamati fenomena peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan destinasi wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo. Penelitian akan menganalisis fenomena serta indikator-indikator terkait dengan menggunakan teori dan instrumen yang menjadi dasar acuan peneliti.

1) Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengkaji secara mendalam kontribusi lembaga pemerintah tersebut dalam membangun destinasi wisata tersebut, meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis**, adalah salah satu tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyusun pedoman operasional berdasarkan tugas, fungsi, dan tata kerja yang telah ditetapkan, meliputi:
 - a) Regulasi
 - b) Standar pelayanan
 - c) Koordinasi antar- stakeholder
- b. Pelaksanaan kebijakan**, adalah implementasi operasional dari kebijakan teknis yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi:

- a) Penetapan program-program strategis
 - b) Pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan di lapangan
 - c) Pelaporan hasil kinerja secara berkala
- c. Pemberdayaan Masyarakat,** adalah upaya strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ponorogo dalam mengembangkan kapasitas masyarakat sekitar destinasi wisata, meliputi:
- a) Pelatihan Keterampilan
 - b) Partisipasi Aktif
 - c) Peningkatan Ekonomi
 - d) Pendampingan Berkelanjutan
- d. Tata Kelola Destinasi,** adalah kerangka pengelolaan terpadu yang diimplementasikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ponorogo, meliputi:
- a) Perencanaan strategis
 - b) Pengembangan infrastruktur
- e. Pengembangan Industri Pariwisata,** adalah upaya terstruktur Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, meliputi:
- a) Penguatan ekosistem wisata
 - b) Promosi dan pemasaran

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kawasan Pariwisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Analisis faktor dilakukan untuk mengkaji akar permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya peran dinas dalam pengembangan pariwisata Telaga Ngebel, terdapat beberapa aspek meliputi:

- a. **Regulator**, berfungsi sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kerangka regulasi untuk memastikan pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, meliputi:
 - a) Perumusan kebijakan dan regulasi
 - b) Pengawasan dan penegakan hukum
- b. **Fasilitator**, berperan dalam menjembatani kesenjangan antara potensi wilayah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Peran ini tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi secara aktif menciptakan mekanisme partisipatif untuk memastikan pembangunan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas, meliputi:
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
 - b) Akselerasi akses sumber daya
- c. **Pelaksana (Implementor)**, memegang peran krusial dalam melaksanakan kebijakan dan perencanaan menjadi aksi nyata di lapangan. Aktor ini tidak hanya bertanggung jawab atas eksekusi program, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kebutuhan stakeholders meliputi:

- a) Pengelola operasional harian destinasi
- b) Koordinator lapangan multipihak

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap dinamika pengembangan pariwisata di kawasan Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Sesuai dengan perspektif Sugiyono (2023), pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian yang bertujuan memahami makna dari suatu fenomena sosial, terutama ketika objek yang diteliti bersifat kompleks, dinamis, dan kontekstual. Sugiyono menjelaskan bahwa metode kualitatif bersifat *naturalistik*, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan pengumpulan serta penafsiran data di lapangan. Permasalahan dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan sementara, sehingga dapat mengalami perubahan atau perkembangan sesuai dengan dinamika temuan yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, rumusan masalah bersifat fleksibel dan dapat mengalami penyempurnaan seiring proses penggalan data berlangsung.

Penelitian ini berfokus pada upaya mendalami peran strategis yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam proses pengembangan kawasan Telaga Ngebel sebagai destinasi

ekowisata unggulan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam proses pengembangan tersebut.

1.9.2. Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di dua titik utama, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo sebagai institusi pengelola kebijakan dan Kawasan Pariwisata Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Jawa Timur, sebagai objek pengembangan wisata. Pemilihan kedua lokus ini didasarkan pada relevansi penelitian yang bertujuan menganalisis peran dinas terkait dalam mengoptimalkan potensi Telaga Ngebel sebagai destinasi wisata unggulan.

1.9.3. Fenomena Penelitian

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

No.	Konsep	Fenomena	Gejala
1.	Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan		

No.	Konsep	Fenomena	Gejala
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 150 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja		
		Peran Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	1. Perumusan kebijakan Teknis 2. Pelaksana Kebijakan 3. Pemberdayaan Masyarakat 4. Tata Kelola Destinasi 5. Industri Pariwisata
2.	Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan Pariwisata Tekaga Ngebel Kabupaten Ponorogo	1. Regulator	1. Perumusan Kebijakan 2. Pengawasan dan Penegakan Hukum
		2. Fasilitator	1. Penyedia Sarana dan Prasarana 2. Akselerasi Sumber Daya
		3. Pelaksana	1. Pengelola Operasional

No.	Konsep	Fenomena	Gejala
			2. Koordinator Lapangan

1.9.4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena memprioritaskan pemilihan informan secara selektif berdasarkan pertimbangan tertentu yang sejalan dengan tujuan dan fokus penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan kedalaman pengetahuan, keterlibatan langsung, serta kredibilitas mereka terkait pengembangan pariwisata Telaga Ngebel.

Menurut Sugiyono (2023), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan penelitian, dimana hanya individu yang memenuhi kriteria tertentu yang dipilih sebagai sumber data. Sugiyono juga menegaskan bahwa dalam pendekatan kualitatif, jumlah sampel tidak ditentukan secara statistik melainkan berdasarkan kecukupan informasi (*information sufficiency*). Pengambilan informan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif sampai pada titik kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika penambahan informan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan. Proses penetapan informan ini bersifat fleksibel dan bertahap. Biasanya dimulai dari individu yang dianggap sebagai informan kunci (*key informant*), yang memiliki akses luas terhadap

jejaring sosial dan dinamika lokasi penelitian. Subjek Penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo
2. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo
3. Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo
4. Pendamping Ekosistem Pariwisata Telaga Ngebel kabupaten Ponorogo
5. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pupus
6. Pendamping UMKM di Kawasan Pariwisata Telaga Ngebel
7. Pengunjung wisatawan di Sekitar Kawasan Pariwisata Telaga Ngebel

Tabel 1. 4 Subyek Penelitian

No.	Status	Teknik Pemilihan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Kabupaten Ponorogo	<i>Purposive Sampling</i>	1
2.	Sub Koordinator Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kabupaten Ponorogo	<i>Purposive Sampling</i>	1

No.	Status	Teknik Pemilihan	Jumlah
3.	Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ponorogo	<i>Purposive Sampling</i>	1
4.	Pendamping Ekosistem Pariwisata Telaga Ngebel kabupaten Ponorogo	<i>Purposive Sampling</i>	1
5.	Ketua Pokdarwis Desa Pupus	<i>Purposive Sampling</i>	1
6.	Pendamping UMKM Sekaligus Pelaku UMKM di Kawasan Pariwisata Telaga Ngebel	<i>Purposive sampling</i>	1
7.	Pengunjung wisatawan di Sekitar Kawasan Pariwisata Telaga Ngebel	<i>Random Sampling</i>	1
Total			7

1.9.5. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan berbagai bentuk data deskriptif yang bersifat naratif. Data yang dikumpulkan berupa informasi verbal, rekaman observasi lapangan, serta dokumen pendukung yang relevan. Sumber primer diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan informan kunci, sementara sumber sekunder berasal dari arsip resmi dan dokumentasi visual seperti foto kegiatan.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data dirancang secara strategis guna menghasilkan informasi yang selaras dengan tujuan eksplorasi fenomena secara mendalam melalui pendekatan naturalistik. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2023), penelitian kualitatif menekankan pada konteks alami (*natural setting*), dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan sumber data primer. Pengumpulan data dilakukan secara simultan melalui tiga pendekatan pokok, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang masing-masing saling melengkapi dalam membangun kredibilitas data.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik sebagaimana disarankan oleh Sugiyono, yaitu:

1. Wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat dinas, pelaku usaha wisata, dan tokoh masyarakat setempat;
2. Observasi partisipatif untuk memahami secara langsung aktivitas di lapangan dan keterlibatan masyarakat;
3. Kajian dokumentasi, termasuk telaah terhadap laporan resmi dinas, peraturan daerah, peta promosi wisata, serta dokumen perencanaan pembangunan pariwisata.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis data kualitatif dengan mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, sebagaimana diadaptasi dan dijelaskan secara mendalam oleh Sugiyono (2023). Analisis ini dilakukan melalui tiga komponen utama yang saling terhubung, yaitu: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*).

1. Kondensasi Data

Peneliti menyaring berbagai informasi yang diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen resmi, maupun bukti visual, dengan tujuan menyisihkan data yang tidak relevan terhadap fokus penelitian. Sugiyono menekankan bahwa kondensasi data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, bukan hanya setelah data dikumpulkan. Kegiatan wawancara sendiri dilaksanakan secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fokus kajian yang sedang diteliti.

2. Penyajian Data

Penyajian ini tidak hanya menggunakan uraian teks, tetapi juga memperkaya pemahaman melalui visualisasi berupa matriks, diagram alur, atau bagan kategorisasi. Sugiyono (2023) menyebutkan bahwa penyajian data berfungsi sebagai alat bantu berpikir agar peneliti dapat

melihat keterkaitan logis antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga dapat diarahkan pada perumusan kesimpulan yang bermakna.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Komponen terakhir dari proses analisis melibatkan aktivitas peneliti untuk merumuskan temuan dari pola-pola yang muncul selama proses analisis. Kesimpulan bersifat sementara (*tentatif*) pada tahap awal, kemudian divalidasi melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu. Sugiyono menegaskan bahwa proses penarikan kesimpulan harus dilakukan secara berulang (*iteratif*) dan kontekstual, agar hasil akhir mencerminkan realitas lapangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.9.8. Kualitas Data dan Validitas

Guna memastikan validitas data dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber sebagai strategi dalam pengujian validitas. Menurut Sugiyono (2023), triangulasi sumber adalah salah satu teknik pengujian kredibilitas yang dilakukan dengan cara membandingkan dari berbagai sumber yang berbeda namun berkaitan erat.

Melalui triangulasi ini, peneliti tidak hanya mengandalkan satu perspektif informan, tetapi menyusun bukti dari berbagai pihak untuk mengidentifikasi konsistensi informasi. Sugiyono menjelaskan bahwa “*bila informasi dari berbagai sumber data menunjukkan kesamaan makna, maka data tersebut dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi*”. Terkait

penelitian pengembangan pariwisata Telaga Ngebel, triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkonfirmasi data yang berasal dari tiga sumber utama: wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung di lapangan, serta dokumen resmi terkait pengelolaan kawasan wisata.